

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Seluruh kegiatan organisasi baik pemerintahan ataupun swasta senantiasa dituntut untuk transparansi dan akuntabilitas. Akuntabilitas dan transparansi sangat penting agar entitas publik dapat memperoleh manfaat diluar organisasi dan meningkatkan kedudukannya dalam domain sosial dan budaya dimana lembaga tersebut berada. Akuntabilitas adalah bentuk kewajiban mempertanggungjawabkan keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan misi organisasi dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan sebelumnya, melalui suatu media pertanggungjawaban yang dilaksanakan secara periodik.

Berdasarkan ukuran kepemilikannya, organisasi dibagi menjadi 2 yaitu organisasi sektor privat dan organisasi sektor publik. Organisasi sektor privat adalah organisasi yang kepemilikannya lebih didominasi oleh kepemilikan satu atau sekelompok investor sedangkan organisasi sektor publik merupakan organisasi yang dimiliki oleh publik atau masyarakat. Artinya, organisasi sektor publik memiliki wilayah dan kompleksitas yang lebih besar dibandingkan organisasi sektor privat. Keluasan wilayah organisasi sektor publik tidak hanya disebabkan luasnya jenis dan bentuk organisasi yang berada didalamnya, akan tetapi juga karena kompleksnya lingkungan yang memengaruhi lembaga-lembaga publik tersebut.¹ Sering kali, organisasi sektor publik merujuk pada organisasi pemerintahan.

Dilihat dari segi jenis usahanya organisasi pemerintahan dibagi jadi 2, yakni organisasi berorientasi pada laba (*profit-oriented*) dan organisasi nirlaba (*non profit*). Organisasi berorientasi pada laba merupakan proses kerjasama yang dijalankan oleh sekelompok orang untuk mencapai tujuan bersama dalam menghasilkan laba. Sebaliknya organisasi nirlaba merupakan organisasi yang tidak didirikan untuk mencari keuntungan.²

¹ Mardiasmo. 2009. *Akuntansi Sektor Publik*. Yogyakarta: ANDI.

² Kamilia, Ibna dan Pujiarti. 2017. *Akuntabilitas dan Pengelolaan Keuangan Masjid Melalui Pendekatan Fenomenologi (Studi Kasus Pada Yayasan Masjid Baiturrahman Pakusari – Jember)*. JIAI Vol. 2, No. 1.

Organisasi nirlaba ialah organisasi yang bergerak dalam pelayanan sosial yang dikelola oleh masyarakat dan tidak bertujuan mencari keuntungan. Suatu organisasi nirlaba mendapatkan sumber dayanya dari penyumbang yang tidak mengharapkan imbalan, menghasilkan barang ataupun jasa tanpa memupuk laba, dan tidak mempunyai kepemilikan. Organisasi nirlaba meliputi organisasi keagamaan, sekolah, rumah sakit, dan klinik publik, organisasi politis, organisasi masyarakat, serikat buruh. Organisasi keagamaan mengacu pada organisasi dalam suatu tempat peribadatan misalnya masjid.³

Berdasarkan PSAK No. 45 terdiri dari paragraf 01 sampai dengan 36 yang telah diganti dengan ISAK no. 35, isi dari pernyataan ini merupakan standar khusus untuk organisasi nirlaba. Karakteristik entitas nirlaba berbeda dengan entitas bisnis pada umumnya. dilihat dari cara memperoleh sumber dayanya. Sumber daya yang di peroleh dari entitas nirlaba, berasal dari pemberi sumber daya yang tidak mengharapkan imbalan. Sumber daya tersebut digunakan untuk melakukan berbagai aktivitas operasional yang dilakukan di dalam entitas nirlaba.

Masjid ialah organisasi keagamaan yang merupakan salah satu bentuk organisasi nirlaba, yang mengelola keuangan dari para jamaah. Dana organisasi keagamaan berasal dari umat dan sumbangan dari pihak-pihak tertentu. Dana tersebut bisa berupa zakat, infak, sedekah, bantuan dari pemerintah ataupun swasta, dan lain-lain. Dana tersebut dibutuhkan untuk menunjang aktivitas keagamaan, penyediaan sarana dan prasarana serta pembangunan masjid. Sebagai lembaga yang pelaporan akuntansinya menggunakan dana publik sebagai sumber keuangan dalam berbagai bentuk, masjid ialah bagian dari entitas publik yang aktivitasnya bertanggung jawab kepada publik. Karena transparansi dan akuntabilitas merupakan kata kunci yang penting untuk suatu entitas publik guna bertahan dan mengoptimalkan kedudukannya dimana entitas tersebut berada.

Penerapan akuntansi sebagai instrumen akuntabilitas pada entitas keagamaan khususnya Islam melalui masjid masih sedikit menjadi perhatian khusus. Sedangkan dalam rangka pelaksanaan prinsip akuntabilitas pada masyarakat,

³ Endang. 2017. *Penerapan akuntabilitas dan Transparansi dalam Pengelolaan Keuangan Masjid Jami An-Nur Sekayu*. Jurnal ACSY Politeknik Sekayu. Vol VI, No I

manajemen suatu entitas dituntut untuk melakukan pengelolaan keuangan, termasuk sosialisasi dan pertanggungjawaban laporan keuangan.⁴

Selama ini tempat ibadah hanya dijadikan tempat untuk melakukan atau melayani aktivitas ritual peribadatan, seperti sholat, berdoa, berdzikir dan lain sebagainya. Namun, sebenarnya tempat ibadah apabila disadari sebagai salah satu bentuk organisasi memiliki peranan yang sangat strategis dalam peningkatan kesejahteraan masyarakat, bahkan tidak kalah strategisnya dengan jenis organisasi publik lainnya. Tempat ibadah dapat dijadikan sebagai pusat aktivitas dari masyarakat yang meliputi berbagai bidang seperti pendidikan, ekonomi, sosial, budaya, dan hukum⁵. Pada organisasi masjid, tentu ukuran keberhasilan disesuaikan dengan beberapa aspek, seperti misalnya aspek kebersihan tidak hanya diukur dari kenyamanan maupun kepuasan umat muslim yang beribadah di masjid tersebut. Untuk itu, dalam organisasi keagamaan kesesuaian dengan ajaran agama juga memengaruhi ukuran keberhasilan dan standar pelayanan, yang nantinya juga memengaruhi kewajaran penggunaan dana yang dialokasikan.

Apabila melihat perkembangan masjid secara umum disaat ini, terutama dalam perihal kepengurusan seperti imam, muadzin, khotib dan pengurus yang lain sering disebut juga sebagai ta'mir masjid. Ta'mir umumnya merupakan orang-orang yang telah sangat tua dan tidak mempunyai latar belakang keilmuan untuk mengurus keuangan secara handal. Hal ini menimbulkan permasalahan ketika dana masjid yang diterima dari infaq ataupun donatur tidak ditangani tanpa proses pencatatan keuangan yang baik.

Banyak masyarakat yang antipati terhadap masjid sebab minimnya transparansi dalam pelaporan keuangan dan pengelolaan masjid yang tidak baik menimbulkan banyak jamaah yang keluar. Kasus lain yang sering timbul adalah masih banyaknya masjid yang tidak mencatat penerimaan dan pengeluaran kas secara rinci, umumnya hanya pencatatan penerimaan dan pengeluaran kas saja

⁴ Nurlailah, Nurleni dan Madris. 2014. Akuntabilitas dan Keuangan Masjid di Kecamatan Tubo Sendana Kabupaten Majene. *Jurnal Akuntansi*. 4(2): 206-217.

⁵ Halim, Abdul dan Muhammad Syam Kusufi. 2014. *Teori, Konsep, dan Aplikasi Akuntansi Sektor Publik dari Anggaran hingga Laporan Keuangan dari Pemerintah hingga Tempat Ibadah*. Jakarta: Salemba Empat.

tidak menyebutkan sumber dari penerimaan kas dan penggunaan kas masjid untuk keperluan apa saja, sehingga terkadang hal ini terjadi menimbulkan kecurigaan di masyarakat.

Umumnya pencatatan keuangan masjid hanya mencantumkan penerimaan dan pengeluaran kas masjid, tidak menampilkan jumlah aset yang dimiliki masjid dan berapa nilainya, terdapat permasalahan dimana aset masjid hilang karena kelemahan sistem pelaporan keuangan. Belum lagi terdapat perbedaan yang mencolok antara masjid yang satu dengan yang lain, masjid yang satu mempunyai dana yang lumayan besar, sebaliknya masjid yang lain sangat sedikit sehingga pengurus masjid bersusah payah mengumpulkan sumbangan di sana-sini, dan itu merupakan citra kurang baik untuk jamaahnya. Oleh sebab itu, pelaksanaan sistem keuangan yang baik akan memberikan jawaban yang tepat atas ketidakpercayaan masyarakat terhadap organisasi masjid dan ta'mir/pengurusnya.

Tabel 1. 1
Contoh Buku Kas Umum

Tanggal	No. Perkiraan	Keterangan	Debit	Kredit	Saldo
01/07/2021	60046	Laundry Karpet Hijau 10 Gulung	-	1.125.000	34.000.609
01/07/2021	60046	Konsumsi Yasin dan Tahlil	-	150.000	33.850.609
02/07/2021	50014	Infaq Masjid & Baksos H. Soegeng	2.000.000	-	35.850.609
02/07/2021	60047	Khotib Jumat	-	500.000	35.350.609
03/07/2021	60037	Kajian Ustad Sarifudin Jatnika MA	-	500.000	34.850.609
03/07/2021	60046	Nasi Uduk 20 Porsi (Sarapan Santri & Ta'mir)	-	200.000	34.650.609
03/07/2021	50012	Kotak Infaq Jumat	2.196.000	-	36.846.609
03/07/2021	50011	Kotak Infaq Masjid	750.000	-	37.596.609
03/07/2021	50013	Kotak kajian Sabtu pagi	105.000	-	37.701.609
04/07/2021	60037	Kajian Ahad Pagi	-	750.000	36.951.609
04/07/2021	50012	Kotak Kajian Ahad Pagi	-	-	36.951.609

Pada tabel diatas merupakan contoh laporan buku kas umum yang dibuat oleh para pengurus masjid sebelum membuat laporan keuangan pemasukan dan pengeluaran kas, terlebih dahulu membuat buku kas umum yang mencakup pemasukan dan pengeluaran kas secara detailnya, dan adapula beberapa masjid yang hanya melampirkan catatan buku kas umumnya saja. Umumnya laporan keuangan dibuat secara sederhana mungkin karena agar memudahkan mereka dalam pencatatan keuangan, dan minimnya pengetahuan cara membuat laporan keuangan yang sesuai dengan standar yang berlaku. Pada realita dilapangannya, dalam pencatatan keuangan Masjid Jami' Mekar Indah pengurus hanya membuat laporan pencatatan pemasukan dan pengeluaran saja. Meski demikian, seperti setiap terdapat pemasukan dan pengeluaran dicatat dengan baik serta mempunyai data yang lengkap dan arsipnya ditata dengan rapi. Jadi, mengenai penerapan standar keuangan akuntansi yang sesuai ISAK 35 di Masjid Jami' Mekar Indah memanglah pengurus masjid belum menerapkan ISAK 35 dalam penyajian laporan keuangannya karena merasa bukan bentuk badan usaha.

Berdasarkan latar belakang masalah tersebut, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul: **“IMPLEMENTASI AKUNTABILITAS PENGELOLAAN KEUANGAN MASJID BERDASARKAN ISAK 35 TENTANG PENYAJIAN LAPORAN KEUANGAN ENTITAS BERORIENTASI NONLABA”**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah dikemukakan di atas, maka yang menjadi rumusan masalah pada penelitian ini adalah:

1. Bagaimana implementasi akuntabilitas pada pengelolaan keuangan Masjid Jami' Mekar Indah Cikarang?
2. Bagaimana kesesuaian pengelolaan keuangan Masjid Jami' Mekar Indah Cikarang dengan ISAK 35?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan latar belakang dan perumusan masalah diatas, maka tujuan penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui dan menganalisis implementasi akuntabilitas pada pengelolaan keuangan Masjid Jami' Mekar Indah Cikarang
2. Untuk mengetahui dan menganalisis kesesuaian pengelolaan keuangan Masjid Jami' Mekar Indah Cikarang dengan ISAK 35

D. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat dalam penelitian ini adalah:

1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat mengetahui pengelolaan keuangan yang ada pada entitas nonlaba, sistem yang digunakan dalam pengelolaan dan dan memberikan wawasan tentang pengelolaan keuangan pada masyarakat. Dan juga untuk memberikan informasi bahwa dalam pencatatan yang berkaitan dengan pengelolaan keuangan masjid harus akuntabilitas dan transparansi.

2. Manfaat Praktis

a. Bagi Penulis

Melalui penelitian ini, penulis memperoleh pengalaman dengan meneliti secara langsung ke lapangan untuk mengetahui bagaimana pelaporan keuangan entitas nonlaba pada lembaga masjid.

b. Bagi Lembaga

Adanya penelitian ini akan memberikan pengetahuan untuk penyusunan laporan keuangan sesuai dengan standar yang telah ditentukan.

c. Bagi Masyarakat

Dengan diterapkannya penelitian ini masyarakat dapat mengetahui laporan keuangan entitas nonlaba menurut ISAK 35, dan masyarakat dapat mengetahui secara detail mengenai dana yang dikelola masjid.